BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan sistem hukum tata negara yang dipimpin oleh pemerintah. Dalam negara hukum, hukum berfungsi sebagai aturan utama penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan kemasyarakatan dalam rangka untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Artinya tujuan negara hukum adalah untuk menciptakan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada keadilan, keharmonisan, dan kemanfaatan. Dalam negara hukum, hukum dijadikan sebagai instrumen atau alat untuk menata segala hal yang berhubungan dengan sistem ketatanegaraan .

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum pelaksanaan cita-cita bangsa dan tujuan negara. Dalam rangka mencapai tujuan negara, diperlukan Aparatur Sipil Negara sebagai abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, bersih, bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.¹ Hal tersebut

¹ Miftah Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*, (Prenada Media, 2005), hal 43.

diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (disingkat dengan UU ASN).

Pengertian dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 dan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah .
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan .

Dasar pertimbangan dan pembentukan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023, antara lain untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, dimana ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan menata sistem kepegawaian. Diperlukan transformasi melalui reformasi birokrasi yang berorientasi membentuk aparatur negara yang kompeten dan profesional menuju pemerintahan yang baik.²

Dalam upaya membangun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas, perlu dibangun paradigma baru tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk dapat mewujudkan hal tersebut diperlukan ASN

² Aldenila Berlianti Akny, "Mewujudkan Good Governance Melalui Reformasi Birokrasi Di Bidang SDM Aparatur Untuk Peningkatan Kesejahteraan Pegawai," *Jejaring Adm. Publik J. Ilmiah, Univ. Airlangga* 6, no. 1 (2014): hal 417.

yang profesional dan memiliki kompetensi yang tinggi dalam melayani publik dan tanggungjawabnya sebagai pelayan masyarakat. Dalam pelayanan publik, khususnya yang terjadi secara tatap muka atau melibatkan interaksi antara penyedia layanan dan penerima layanan, hal tersebut merupakan proses komunikasi. Artinya, seluruh pelaku yang terlibat dalam pelayanan publik, khususnya ASN, harus memahami dan mampu menerapkan prinsip-prinsip komunikasi agar dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas.³

Berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan publik, menjaga integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya merupakan bagian penting dari etika sebagai ASN. Etika ASN mencakup prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang diakui masyarakat selain kewajiban hukum yang ditetapkan oleh undang-undang. Beberapa pengaturan undang-undang yang relevan mengatur perilaku ASN sebagai pelayan publik adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN: Mengatur tentang netralitas, loyalitas, dan integritas ASN dalam menjalankan tugas mereka sebagai pelayan publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik ASN: Banyak lembaga pemerintah memiliki peraturan internal atau kode etik yang mengatur perilaku etis ASN.

³ MI Suhifatullah, "Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Komunikasi Etis Aparatur Sipil Negara," *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi* 1, no. 2 (2019): hal 165.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS: Mengatur mengenai disiplin PNS dan sanksi-sanksi apa saja bagi pelanggarnya.

Selain memenuhi tanggung jawab hukum, ASN juga harus mematuhi standar moral dan etika yang berlaku di masyarakat. Salah satu dari prinsip-prinsip ini adalah sebagai berikut:

1. Integritas: ASN harus bertindak dengan jujur, adil, dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya;
2. Transparansi: ASN diharapkan untuk berkomunikasi dengan jelas dan terbuka kepada masyarakat tentang kebijakan dan tindakan mereka;
3. Profesionalisme: ASN harus menjalankan tugasnya dengan tingkat kompetensi dan dedikasi yang tinggi, sambil menghindari konflik kepentingan;
4. Pelayanan Publik: ASN harus memberikan layanan publik yang berkualitas tinggi kepada masyarakat.

Beberapa poin-poin yang sudah dijabarkan diatas merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 yang dimana ASN sebagai pelayan publik harus mematuhi prinsip-prinsip etika yang terkandung didalamnya serta mengacu pada norma umum yang berlaku dalam undang-undang.

Dalam perkembangan dinamika masyarakat di Indonesia terdapat perilaku-perilaku yang mengikat ASN dalam melakukan tugas dan

tanggungjawabnya. Kemampuan aparaturnya dalam melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan pembangunan relatif masih rendah, sehingga belum berlangsung secara efisien dan efektif. Di lingkungan ASN masih ditemui berbagai kelemahan. Di antara kelemahan-kelemahan itu adalah masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan dan keuangan negara, pungutan liar serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya. Dalam hal tindakan tersebut dapat membuat para pegawai pemerintah melanggar Kode Etik ASN .

Kode Etik dapat digambarkan sebagai aturan-aturan moral yang terkait dengan suatu profesi, pekerjaan, atau jabatan tertentu yang mengikat dan membimbing para anggotanya mengenai nilai-nilai baik dan buruk, benar dan salah dalam wadah-wadah organisasi bersama. Adanya kode etik memuat aturan-aturan yang mencerminkan upaya dari suatu organisasi untuk mengkodifikasikan nilai-nilai kelompok berupa pernyataan yang ditujukan kepada para anggotanya tentang prinsip-prinsip apa yang benar dan apa yang salah sebagai pegangan dalam membuat keputusan dalam organisasi.⁴ Secara umum, dalam berkomunikasi diperlukan norma-norma atau aturan-aturan yang berfungsi sebagai pengendali atau kontrol sosial. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang tertib. Adanya etika merupakan salah satu cara untuk mewujudkan masyarakat yang tertib.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)* (Sinar Grafika, 2022), 103 hal 4.

Berkaitan dengan kode etik, ASN memiliki tugas dan fungsi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil Negara , yaitu :

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas ; dan
3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Merujuk pada penjelasan diatas, ASN dalam menjalankan kode etik bukan hanya menjadi pelayan publik yang profesional tetapi juga dalam berperilaku, termasuk ketika menggunakan sosial media. Sosial media telah menjadi sarana komunikasi yang dinamis, oleh karena itu sudah seharusnya aparatur sipil negara harus menjunjung tinggi nilai dasar dan kode etik mereka yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai PNS. Aparatur sipil Negara juga dituntut lebih bijak dalam penggunaan sosial media agar mereka dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan kewajiban mereka sebagai seorang ASN.⁵

Menurut Nasution, “Saat ini banyak pegawai ASN yang diduga melanggar ketentuan etik atau melakukan pelanggaran etik yang sudah seharusnya dijaga karena mereka merupakan pegawai pemerintah dan

⁵ M. Agus Yosami, “8 Hal Yang Harus Diperhatikan PNS dalam Bermedsos”, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/8-hal-yangharus-diperhatikan-pns-dalam-bermedsos/>, diakses pada tanggal 12-11-2023 14.27 WIB

pegawai negeri sipil yang menjalankan roda pemerintahan di Indonesia”.⁶ Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pelanggaran kode etik dalam penggunaan sosial media, salah satu contohnya adalah *tren flexing* yang dipamerkan di berbagai platform sosial media yang dinilai tidak wajar oleh masyarakat karena tidak sebanding dengan gaji yang diperoleh sebagai ASN. Berikut beberapa contoh kasus *flexing* yang dilakukan oleh pejabat ASN ataupun keluarganya dan dijelaskan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Contoh Kasus Tindakan *flexing* Yang Dilakukan Oleh Pejabat ASN dan Keluarganya

Pejabat dan/atau ASN	Status	Perilaku <i>flexing</i>
SF.Hariyanto (Sekretaris Daerah Pemprov Riau)	Istri Pejabat ASN	Istri dari pejabat ASN inisering memamerkan harta kekayaannya berupa barang-barang branded. serta sering memposting foto liburan di Eropa melalui platform media sosial.
Eko Darmanto (Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta)	Pejabat ASN	Pejabat ASN ini sering memamerkan kekayaannya berupa moge dan mobil mewah juga kedapatan mengunggah foto pesawat pribadi Cessna di media sosial.
Rafael Alun Trisambodo (Pejabat)	Istri dan Anak Pejabat ASN	Selain kasus penganiayaan, Anak dari Rafael Alun

⁶ Muhammad Ilham Akbar Nasution, “Peran Komisi Aparatur Sipil Negara Terhadap Pelanggaran Etik Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,” 2019, hal 2.

di Kementerian Keuangan)		Trisambodo kedapatan sering mengunggah mobil mewah seperti Rubicon dan moge Harley Davidson di platform media sosialnya. ⁷
--------------------------	--	---

Sumber : Diolah dari Pemberitaan Media Republika Online

Hal tersebut di atas membuat isu kontroversial di masyarakat terkait dengan prinsip kesederhanaan sebagai ASN dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pelayan publik. Prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Dalam pembahasan yang telah dijelaskan di atas, kejadian tersebut menunjukkan bahwa didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS belum ada mengatur dengan tegas mengenai tindakan *flexing* yang dilakukan oleh ASN, hanya saja mengatur secara umum dan tidak mengatur secara khusus tentang perilaku ASN di media sosial.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan penulisan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi dengan judul :

⁷<https://news.republika.co.id/berita/rsjb97330/ini-daftar-pejabat-dan-keluarganya-ya>
Diakses pada tanggal 7-12-2023

“*flexing* Melalui Media Sosial Bagi ASN Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang, penulis mengklasifikasikan rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimana Pengaturan *flexing* Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penggunaan Media Sosial berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Bagaimana Implementasi dan Pengawasan Penegakan Disiplin terhadap Perilaku *flexing* ASN di Media Sosial berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk memahami dan menganalisis pengaturan *flexing* aparatur sipil Negara dalam penggunaan media sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Untuk memahami dan menganalisis implementasi dan pengawasan penegakan disiplin terhadap perilaku *flexing* ASN di media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Penelitian

- a) Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca yang berkenaan dengan

pengaturan *flexing* aparatur sipil negara dalam penggunaan media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b) Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan kesadaran aparatur sipil negara terkait kepatuhan kepada proses hukum yang berlaku.

D. Kerangka Konseptual

Agar mengetahui dan memahami maksud dari judul skripsi ini, mempermudah dalam membahas permasalahan serta menghindari penafsiran yang berbeda maka penulis akan menguraikan beberapa pengertian konsep yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut :

1. *flexing*

flexing atau pamer mempengaruhi kebutuhan dan standar individu.⁸ Kata *flexing* secara harfiah, dalam bahasa Inggris berarti “pamer”. Pengertian *flexing* yang lebih spesifik dalam *Cambridge Dictionary* adalah menunjukkan sesuatu kepemilikan atau pencapaian dengan cara yang dianggap orang lain tidak menyenangkan.⁹ Pada Kamus *Merriam-Webster*, arti *flexing* adalah “memamerkan sesuatu atau yang dimiliki secara mencolok”. *flexing* merupakan fenomena di mana seseorang memamerkan

⁸ Zilal Afwa Ajidin and Nafkhatul Wahidah, “Fenomena *flexing* Di Media Sosial Dan Kaitannya Dengan *Israf*,” *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE* 4, no. 1 (n.d.): hal 1–16.

⁹ Jawade Hafidz Arsyad, “Fenomena *flexing* Di Media Sosial Dalam Aspek Hukum Pidana,” *Jurnal Cakrawala Informasi* 2, no. 1 (2022): hal 10–28.

kekayaannya di media sosial yang bertujuan untuk memperoleh pengakuan kemampuan finansial atau status.

2. Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Bab 1 ketentuan umum pasal 1 angka 2 “Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan publik wajib memberikan teladan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2010, Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil memiliki sanksi atas perbuatan atau hukuman bagi para pelanggarnya, adapun beberapa jenis sanksi bagi Aparatur Sipil Negara diantaranya sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi.¹⁰

3. Media Sosial

Media sosial dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunaannya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial,

¹⁰ Edi Rohaedi, Hasan Basri, and Nandang Kusnadi, “Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kota Bogor,” *PALAR (Pakuan Law Review)* 7, no. 2 (2021): hal 17.

misalnya yaitu melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto dan video.¹¹

4. Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian undang-undang, Menurut Pasal angka 3 adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.

Uraian di atas dapat dikemukakan bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk membahas pelanggaran etika aparatur sipil negara dalam penggunaan sosial media berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Landasan Teoritis

Sebagai landasan dalam penelitian ini yang berdasarkan pada konsep di atas maka penulis menggambarkan beberapa teori yang sesuai untuk menjelaskan dan mencari solusi dari permasalahan yang ada. Teori- teori yang dimaksud antara lain :

1. Teori Etika

¹¹ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/> Diakses pada tanggal 02-06-2024.

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* dengan bentuk jamaknya yakni (*to etha*) yang berarti kebiasaan. Etika sering dipadankan dan dikenal dengan kata “moral” dan “moralitas” yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *mos* dengan bentuk jamaknya yakni (*mores*), di mana artinya juga sama yakni kebiasaan. Menurut Sumaryono (1995) mengemukakan makna dari etika, menurut beliau etika berasal dari bahasa Yunani yakni *Ethos* yang memiliki arti yakni adat istiadat yang baik. Pemadanan makna antara etika dan moralitas memang tidak salah, namun kurang tepat. Karena etika mempunyai arti yang lebih luas dibandingkan dengan moralitas. Etika berarti tidak terbatas pada sikap seseorang terhadap tindakannya saja, tetapi juga mencakup motif seseorang dalam melakukan sikap tersebut. Berbeda dengan yang mana moralitas hanya sebatas perilaku lahiriah seseorang.¹²

Dengan mengikuti penjelasan kamus besar bahasa Indonesia yang dirasa belum mampu menjelaskan secara komprehensif maka K. Bertens menjelaskan kembali makna dari etika dengan menyatakan bahwa etika dapat dibedakan dalam tiga arti, yaitu :

1. Etika dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilakunya.
2. Etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Contohnya kode etik suatu profesi.

¹² Serlika Aprita, “*Etika Profesi Hukum*,” Bandung: PT Refika Aditama, 2020, hal 1–2.

3. Etika sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk. Apa yang disebutkan terakhir ini sama artinya dengan etika sebagai cabang filsafat.

Pada pengertian etika pertama dan kedua dalam penjelasan K.Bertens sebenarnya mengacu pada pengertian yang sama, yaitu etika sebagai sistem nilai. Berbicara tentang etika hukum berarti bicara juga dengan nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok profesi, apa saja hal yang baik ataupun buruk menurut profesi tersebut. Nilai-nilai itu biasanya dituangkan dalam standar tertulis yang disebut kode etik. Jadi nampaknya cukup jelas bahwa etika didefinisikan dalam dua cara. Yang pertama adalah etika sebagai sistem nilai, dan yang lainnya adalah etika sebagai ilmu atau lebih tepatnya sebagai cabang filsafat.

Nilai-nilai etika tercermin dalam kewajiban ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bentuk kewajiban tersebut terakumulasi dalam bentuk sikap dan perilaku yang harus dijaga oleh setiap ASN. Bentuk konkret dari penjabaran itikad baik pemerintah dalam menjunjung tinggi nilai-nilai etika di lingkungan ASN adalah dicantumkannya kode etik ASN Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.¹³

Dalam hal yang sudah dijelaskan di atas, Aparatur Sipil Negara juga memiliki pengaturan dalam beretika yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004,¹⁴ sebagai pelaksanaan

¹³ Sri Hartini, "Hukum Kepegawaian Di Indonesia," 2008, hal 31.

¹⁴ Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142

ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian¹⁵ yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.¹⁶ Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menanamkan jiwa korps dan mengamalkan etika bagi Pegawai Negeri Sipil. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 itu dibedakan antara etika dalam bernegara, etika berorganisasi, bermasyarakat, etika terhadap diri sendiri, dan etika terhadap sejawat atau sesama Pegawai Negeri Sipil. Etika yang berhubungan dengan skripsi ini adalah etika dalam bermasyarakat, yang di mana para Pegawai Negeri Sipil sudah seharusnya mewujudkan pola hidup sederhana, hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. Saat ini, banyak Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindakan *flexing* atau pamer berlebihan melalui sosial media yang menyebabkan masyarakat ataupun publik berpikir bahwa hal yang dilakukan para Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki empati pada masyarakat kalangan bawah.

2. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan negara yang dalam aktifitasnya selalu didasarkan pada hukum guna menjamin dan mewujudkan keadilan bagi warganya.¹⁷ Negara hukum merupakan suatu konsep

¹⁵ Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041

¹⁶ Lembaran Negara Tahun 1999 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980

¹⁷ Muhammad Muslih, “*Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2017): hal 130–52.

pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum:

Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹⁸

Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Menurut pendapat Hadjon,¹⁹ kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbed. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Meskipun demikian perbedaan keduanya saat ini tidak dipermasalahkan lagi karena mengarah pada tujuan yang sama yaitu perlindungan hak asasi manusia.

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu

¹⁸ Moh Kusnardi and Harmaily Ibrahim, "Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia," 1998, hal 152–53.

¹⁹ Philipus M Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara," Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hal 72.

“*Rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha negara.

Sementara A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu :

1. *Supremacy of law*
2. *Equality before the law*
3. *Due process of law*²⁰

Keempat prinsip “*Rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern.

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena

²⁰ Ernst Utrecht, “*Pengantar Hukum Administrasi Negara*” (PT. Ichtiar Baru, 1985), hal 9.

itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang menjadi pengaturan mengenai perilaku dan etika untuk meningkatkan profesionalitas dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat .

3. Teori Perundang-Undangan

Istilah Perundang - undangan dan Peraturan perundang – undangan berasal dari kata undang – undang, yang merujuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh Negara. Dalam literature Belanda di kenal istilah *wet* yang mempunyai dua macam arti yaitu *wet in formele zin* dan *wet in materiele zin* yaitu pengertian undang – undang yang didasarkan kepada isi atau substansinya.²¹ Menurut Bagir Manan, peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.

Kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya, yang mana UUD Tahun 1945 merupakan peraturan tertinggi didalam sistem hukum Indonesia dan menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan dibawahnya. Teori Perundang- undangan merupakan

²¹ S H Ni'matul Huda and Riri Nazriyah, *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Nusamedia, 2019), hal 4.

suatu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum di bentuk atau terbentuk oleh lembaga atau pejabat Negara, yang memiliki wewenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Demi memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik harus memiliki 3 landasan, yaitu :

1. Landasan Filosofis;
2. Landasan Sosiologis; dan
3. Landasan Yuridis

Teori pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat negara yang berwenang dan disertai bukti-bukti tertulis sebagai

wujud adanya aturan tersebut. Aturan tidak tertulis adalah hal-hal yang pernah ada dan hidup dalam kehidupan suatu masyarakat, misalnya aturan turun-temurun yang diterapkan dalam kerangka masyarakat tersebut.

F. Orisinalitas Penelitian

untuk memastikan keaslian penelitian ini dan mempermudah pemahaman perbedaan isu hukum yang diteliti dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Berikut beberapa journal yang dijadikan bahan keaslian penelitian ini dan dijelaskan pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Perbandingan Penelitian Penulis dengan Penelitian yang telah ada sebelumnya

Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Skripsi: Ahmad Zaki Nur Fauzi (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2022)	Tren <i>flexing</i> di Media Sosial	Persamaan yang terdapat pada penelitian ini dengan judul yang akan saya teliti adalah sama-sama membahas mengenai perilaku <i>flexing</i> di media sosial	Perbedaan antara penelitian ini dengan judul yang akan saya teliti adalah pembahasan pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Sedangkan

			penulis menggunakan pendekatan undang-undang sesuai dengan isu hukum yang penulis teliti.
Skripsi: Roida Pakpahan, Donny Yoesgiantoro (Universitas Bina Sarana Informatika, Universitas Pertahanan, 2023)	Analisa Pengaruh <i>flexing</i> Di Media Sosial Terhadap Kehidupan Masyarakat	Persamaan yang terdapat pada penelitian ini dengan judul yang akan saya teliti adalah sama-sama bertujuan untuk menganalisis <i>flexing</i> yang dilakukan oleh ASN di media sosial	Perbedaan antara penelitian ini dengan judul yang akan saya teliti adalah terletak pada pengaturannya. Penelitian ini tidak menggunakan undang-undang sebagai bahan acuan penelitian melainkan dengan literature seperti

			buku,website resmi,dan lain-lain. Sedangkan penulis menggunakan pengaturan khusus berupa undang-undang terkait.
Tesis: Imam Kusnadi (2023)	Fenomena <i>flexing</i> Harta Mewah di Kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Implikasinya	Persamaan yang terdapat pada penelitian ini dengan judul yang akan saya teliti adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menunjukkan bukti contoh	Perbedaan antara penelitian ini dengan judul yang saya teliti adalah pada penelitian ini lebih memfokuskan implikasi terkait pelanggaran <i>flexing</i> ASN. Sedangkan penulis lebih menekankan

		kasus <i>flexing</i> yang dilakukan oleh ASN.	implementasi dan pengawasan dari tindakan <i>flexing</i> yang dilakukan ASN di media sosial.
--	--	---	--

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa: “Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum , prinsip-prinsip hukum , maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.²² Sementara menurut Bahder Johan Nasution “Penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian mengenai:

- a) Asas-asas hukum;
- b) Sistematika hukum;
- c) Taraf sinkronisasi hukum;
- d) Perbandingan hukum;
- e) Sejarah hukum.²³

²² Peter Mahmud Marzuki, “*Metode Penelitian Hukum*,” Jakarta: Kencana Prenada, 2010, hal 35.

²³ Bahder Johan Nasution, “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*” (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal 86.

Atas dasar itu pengkajian dalam penulisan ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan kaedah-kaedah hukum yang berhubungan dengan *flexing* dalam penggunaan sosial media bagi ASN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan yang di gunakan

Sehubungan dengan tipe penelitian ini adalah hukum normatif, Bahder Johan mengemukakan , bahwa :

Dalam Pendekatan ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas . Pendekatan tersebut antara lain :

- a) Pendekatan undang-undang atau statuta approach dan sebagian ilmunan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
- b) Pendekatan historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan perodesasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.
- c) Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatic konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.
- d) Pendekatan komparatif, yaitu penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar Negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam suatu negara.
- e) Pendekatan politis, yaitu penelitian terhadap pertimbangan-pertimbangan atau kebijakan elite politik dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan penegakan berbagai produk hukum.

- f) Pendekatan kefilosofan, yaitu pendekatan mengenai bidang-bidang yang menyangkut dengan obyek kajian filsafat hukum yang meliputi:
 - a) Ontologi hukum, yaitu mengkaji hakekat seperti hakekat demokrasi, hubungan hukum dengan moral, dan sebagainya.
 - b) Aksiologi hukum, yaitu mempelajari isi dari nilai seperti nilai kebenaran, nilai keadilan, nilai kebebasan, dan sebagainya.
 - c) Epistemologi hukum, yaitu cara mendapat pengetahuan yang benar tentang ilmu hukum.
 - d) Teleologi hukum, yaitu menentukan isi dan tujuan hukum.
 - e) Ideologi hukum, yaitu pemahaman secara menyeluruh tentang manusia dan masyarakat.
 - f) Logika hukum, yaitu mempelajari kaidah-kaidah berpikir secara umum dan argumentasi hukum.
 - g) Keilmuan hukum, yaitu merupakan meta teori bagi hukum.²⁴

Dilihat dari kajian hukum yang diangkat dari penelitian ini, yaitu mengenai *flexing* dalam penggunaan sosial media bagi ASN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Untuk lebih memahami permasalahan yang akan diteliti, maka selain *statute approach*, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

3. Pengumpulan Bahan Hukum

²⁴ Nasution, hal 92-93.

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan bahan hukum yang dikelompokkan menjadi bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai PNS.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok-pokok masalah dalam penelitian ini, baik dalam bentuk buku-buku dalam bidang Hukum Tata Negara, makalah, jurnal dan hasil penelitian actual di bidang ilmu hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

Menurut Bahder Johan Nasution, ia berpendapat bahwa: “Bahan hukum sekunder merupakan bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literatur terkait dengan topik penelitian”²⁵.

c. Bahan Hukum Tersier

²⁵ *ibid*, hal 30.

Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi, hasil tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat *deskriptif kualitatif* yaitu menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan permasalahan yang sesuai dengan bahan hukum yang diperoleh yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian ini . Analisis ini dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. Menginventarisasikan bahan-bahan hukum atau peraturan perundang-undangan yang diperoleh sesuai dengan arti permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini.
- b. Mensistematisasikan atau membuat klarifikasi bahan-bahan hukum atau peraturan perundang-undangan yang diperoleh sesuai dengan permasalahan tersebut.
- c. Menginventarisasikan bahan-bahan atau peraturan perundang-undangan yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan, penulisan skripsi ini disusun secara teratur dalam sistematis yang dimuat dalam suatu sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Teoritis, dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang Tinjauan tentang *flexing*, Media Sosial, Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab permasalahan. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab yang dimuat dalam rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengaturan *flexing* melalui media sosial bagi ASN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, bagaimana implementasi dan pengawasan penegakan disiplin terhadap perilaku ASN di media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran mengenai masalah tersebut.